

## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : **Sekretaris**
2. Tugas :
  - a. perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Dinas yang selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja ;
  - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan ;
  - c. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama, dan hubungan masyarakat ;
  - d. pengelolaan urusan rumah tangga ;
  - e. pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan peningkatan karier pegawai;
  - f. penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran ;
  - g. penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) ;
  - h. penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan Dinas ;
  - i. pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana ;
  - j. pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah
  - k. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang ;
  - l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana ;
  - m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas ;
  - n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	SUMBER DATA
1	2	3	4
Meningkatnya Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	Persentase tingkat pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	$\frac{\text{Jumlah pelayanan administrasi yang terpenuhi di tahun N}}{\text{Jumlah seluruh pelayanan administrasi yang harus terpenuhi}} \times 100$	Laporan data
Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana aparatur	Laporan data
Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan pelaporan kinerja dan keuangan	$\frac{\text{Jumlah jenis laporan kinerja dan keuangan yang dilaporkan}}{\text{Jumlah seluruh jenis laporan dan kinerja yang harus dipenuhi}} \times 100$	Laporan data

## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
2. Tugas :
  - a. menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
  - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas ;
  - c. melakukan penyusunan laporan perencanaan dan kinerja (Rencana Strategi/Renstra, Rencana Kerja/Renja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/LAKIP, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM dan lain-lain) ;
  - d. melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan ;
  - e. melakukan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana ;
  - f. melakukan administrasi kepegawaian ;
  - g. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU) ;
  - h. melakukan pengelolaan pengadaan dan penatausahaan barang inventaris ;
  - i. melakukan surat menyurat, pengarsipan ;
  - j. melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan keprotokolan ;
  - k. melakukan penyiapan bahan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan ;
  - l. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan ;
  - m. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris ;
  - n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Meningkatnya Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran dengan Lancar	Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	Laporan data
Meningkatnya Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana tersedia	Jumlah sarana dan prasarana	Laporan data
Meningkatnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara	Jumlah sarana dan prasarana	Laporan data
Meningkatnya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Reralisasi Kinerja SKPD/LAKIP	Jumlah laporan SAKIP Yang Disusun	Jumlah laporan SAKIP	Laporan data

## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Ka. Sub. Bagian Keuangan
2. Tugas :
  - a. menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Keuangan ;
  - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan anggaran ;
  - c. melaksanakan pemungutan retribusi daerah ;
  - d. penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran ;
  - e. melakukan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan ;
  - f. melakukan urusan perbendaharaan, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar ;
  - g. melakukan urusan gaji pegawai ;
  - h. melakukan administrasi keuangan ;
  - i. melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan ;
  - j. melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran/LRA, neraca dan lain-lain ;
  - k. melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan gatirugi ;
  - l. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris ;
  - m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	SUMBER DATA
1	2	3	4
Meningkatnya Penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi keuangan	Jumlah Jenis Laporan data	Laporan data
Meningkatnya Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Jumlah Jenis Laporan	Laporan Data
Meningkatnya Program Rencana Kinerja dan Anggaran (RKA) SKPD	Jumlah Rencana Kerja dan Anggaran yang di Susun	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Laporan data

## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah
2. Tugas :
  - a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah sebagai pedoman kerja ;
  - b. penyusunan rumusan kebijakan teknis penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;
  - c. penyusunan bahan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;
  - d. penyelenggaraan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;
  - e. penyusunan pedoman dan supervisi penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;
  - f. penyusunan rumusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;
  - g. penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyelidikan peraturan daerah ;
  - h. penetapan rumusan bahan koordinasi penyelenggaraan peraturan perundang-undangan daerah ;
  - i. penetapan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan daerah serta fasilitasi pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS ;
  - j. penetapan rumusan penyusunan bahan fasilitasi dan pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS ;
  - k. penetapan rumusan kebijakan teknis bentuk dan jenis pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah ;
  - l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;
  - m. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak lainnya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;
  - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4
Meningkatnya Penegakan Produk Hukum Daerah	Presentase Penanganan atas Pengaduan/Laporan Masyarakat tentang pelanggaran Perda dan/atau Perkada	$\frac{\text{Jumlah pelanggaran Perda dan/atau Perkada yang selesai ditangani di tahun N}}{\text{Jumlah seluruh pengaduan/laporan pelanggaran Pera dan Perkada di tahun N}} \times 100$	- Data pengaduan/laporan pelanggaranPerda/perkada  - Data pelanggaran Perda yang diselesaikan

## **INDIKATOR KINERJA INDIVIDU**

1. Jabatan : Kepala Seksi Penyelidikan Dan Penyidikan
2. Tugas :
  - a. menyusun rencana dan program kerja operasional penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;
  - b. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan penyelidikan dan penyidikan ;
  - c. menyusun bahan petunjuk teknis operasional penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah ;
  - d. melaksanakan pengelolaan data dan hasil penyelidikan pelanggaran peraturan perundang undangan daerah ;
  - e. melaksanakan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang undangan daerah;
  - f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang undangan daerah
  - g. melaksanakan operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang undangan daerah ;
  - h. melaksanakan koordinasi teknis penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang undangan daerah dengan institusi terkait diwilayah Kabupaten Lumajang ;
  - i. melaksanakan penetapan bentuk dan jenis pelanggaran peraturan perundang undangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
  - j. melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap jenis dan bentuk pelanggaran sebagai bahan masukan pengambilan keputusan pimpinan ;
  - k. menyusun rumusan kebijakan teknis operasional fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas PPNS ;
  - l. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas PPNS ;
  - m. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kemampuan PPNS ;
  - n. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;
  - o. melaksanakan koordinasi penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan perundang undangan daerah dengan Seksi lainnya di lingkungan satpol PP ;
  - p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah.

<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Meningkatnya Penyelidikan dan penyidikan dalam penegakan produk hukum daerah	Jumlah kasus pelanggaran Perda/Perkada	Jumlah penindakan pelanggaran Perda melalui penyidikan, BAP dan persidangan tipiring	Data kegiatan Penyelidikan kasus pelanggaran Perda
Meningkatnya Operasi Pemberantasan barang Kena Cukai Ilegal Bersama Dengan Kantor Wilayah Bea Cukai dan/atau Kantor Pelayanan Bea Cukai Setempat.	Jumlah Operasi Pemberantasan barang Kena Cukai Ilegal Bersama Dengan Kantor Wilayah Bea Cukai dan/atau Kantor Pelayanan Bea Cukai Setempat.	Jumlah kegiatan operasi barang kena cukai illegal	Data laporan hasil kegiatan



## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Kepala Seksi Penyuluhan Masyarakat
2. Tugas :
  - a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Penyuluhan Masyarakat ;
  - b. menyusun dan mengolah bahan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah ;
  - c. menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah ;
  - d. menyusun bahan penyuluhan masyarakat tentang peraturan perundang-undangan daerah ;
  - e. mengelola data penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;
  - f. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas penyuluhan masyarakat tentang peraturan perundang-undangan daerah ;
  - g. melaksanakan koordinasi penyuluhan masyarakat tentang peraturan perundang-undangan daerah dengan Seksi lainnya di lingkungan Satpol PP ;
  - h. melaksanakan koordinasi penyuluhan masyarakat tentang produk hukum daerah dengan instansi terkait
  - i. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada kepala bidang penegak produk hukum daerah.
  - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala bidang penegak Produk Hukum Daerah.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	SUMBER DATA
1	2	3	4
Meningkatnya Penyuluhan Masyarakat yang Responsif Gender dalam Pemahaman Produk Hukum Daerah	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan	Jumlah Peserta Penyuluhan	Data kegiatan penyuluhan

## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan
2. Tugas :
  - a. menyusun rencana dan program kerja operasional pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;
  - b. melaksanakan penyusunan dan pengolahan bahan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah ;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang undangan daerah ;
  - d. mengelola data pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang undangan daerah ;
  - e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah ;
  - f. melaksanakan koordinasi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang undangan daerah dengan Seksi lainnya di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja ;
  - g. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang ;
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	SUMBER DATA
1	2	3	4
Meningkatnya Pembinaan Yang Responsif Gender dan pengawasan dalam penegakkan produk hukum daerah	Jumlah masyarakat yang mengikuti pembinaan dan pengawasan penegakan produk hukum daerah	Jumlah peserta pembinaan	Laporan kegiatan pembinaan

## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat
  
2. Tugas :
  - a penyusunan rencana dan program kerja Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat ;
  - b pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerja sama operasional ;
  - c penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerja sama operasional ;
  - d penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
  - e penetapan rumusan pembinaan teknis pengendalian operasional Polisi Pamong Praja ;
  - f penetapan rumusan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Lumajang ;
  - g penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pimpinan daerah dan pejabat lainnya ;
  - h penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan gedung-gedung milik pemerintah daerah ;
  - i pelaksanaan evaluasi tugas dan laporan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
  - j pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak lainnya dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
  - k pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	SUMBER DATA
1	2	3	4
Meningkatnya Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum	Presentase Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	$\frac{\text{Jumlah kelompok patroli X3 kali sehari}}{\text{Jumlah kelompok patroli kecamatan (jumlah wilayah kecamatan) dalam wilayah kabupaten}} \times 100\%$	Data realisasi patroli se wilayah Kabupaten

## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian
2. Tugas :
  - a. menyusun rencana dan program kerja operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi dan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
  - c. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
  - d. melaksanakan pengamanan, pengawalan perjalanan/kunjungan dinas kepala daerah, tamu pemerintah daerah dan tamu negara ;
  - e. melaksanakan sosialisasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
  - f. melaksanakan patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
  - g. melaksanakan pengamanan pengendalian ketentraman, ketertiban umum dan penegakan peraturan perundang undangan daerah ;
  - h. mengendalikn kegiatan operasional Polisi Pamong Praja ;
  - i. melaksanakan pembinaan tugas Polisi Pamong Praja di wilayah Kabupaten Lumajang ;
  - j. melaksanakan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Lumajang ;
  - k. melaksanakan koordinasi teknis operasional penutupan dan pembongkaran tempat usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang undangan daerah dengan institusi terkait ;
  - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap dampak operasional pengendalian ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan daerah sebagai bahan pelaksanaan tugas lebih lanjut ;
  - m. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
  - n. melaksanakan koordinasi operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Seksi lainnya di lingkungan Satpol PP ;
  - o. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang ;
  - p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	SUMBER DATA
1	2	3	4
Meningkatnya Operasi Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Umum	Jumlah Operasi dan Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan operasi	Data kegiatan operasi

## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Kepala Seksi Kerja Sama
2. Tugas :
  - a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Kerja Sama ;
  - b. menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi dan pelaksanaan kerja sama peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
  - c. menyusun bahan rekomendasi perijinan dan pelayanan umum serta ketentraman masyarakat ;
  - d. melaksanakan operasional pengamanan dan penjagaan sarana dan prasarana gedung pemerintahan daerah dalam rangka menunjang ketentraman dan ketertiban umum daerah ;
  - e. melaksanakan kerjasama operasional bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
  - f. melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap aset daerah ;
  - g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas kerja sama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
  - h. melaksanakan koordinasi kerjasama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Seksi lainnya di lingkungan Satpol PP ;
  - i. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang ;
  - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	SUMBER DATA
1	2	3	4
Peningkatan kerjasama Pemeliharaan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umm antara Pemerintah Daerah Bersama TNI/POLRI/Kejaksaan	Jumlah TNI/POLRI yang menjalin kerja sama Keamanan dan Ketertiban Umum	Jumlah kerjasama bidang trantibum dengan TNI/POLRI	Data laporan kegiatan kerjasama bidang trantibum bersama TNI/Polri

## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Kepala Seksi Pelatihan Dasar
2. Tugas :
  - a. menyusun rencana kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar personil Polisi Pamong Praja ;
  - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan pelatihan dasar, pengembangan kesiapan dan kesigapan personil Polisi Pamong Praja ;
  - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyelenggaraan pelatihan dasar Polisi Pamong Praja ;
  - d. melaksanakan pengembangan kesiapan dan kesigapan personil Polisi Pamong Praja ;
  - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan disiplin dan pengembangan kesamaptaaan personil Polisi Pamong Praja ;
  - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam pembinaan fisik dan non fisik Polisi pamong Praja ;
  - g. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang ;
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	SUMBER DATA
1	2	3	4
Meningkatnya Pembinaan anggota dan Jambore Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah personil yang dibina	Jumlah anggota Satpol PP yang mendapatkan pelatihan fisik dan pembinaan mental	Data laporan anggota Satpol PP yang mengikuti pelatihan fisik dan mental

## **INDIKATOR KINERJA INDIVIDU**

1. Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat
  
2. Tugas :
  - a. penyusunan rencana dan program kerja operasional perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat ;
  - b. pelaksanaan kesiapsiagaan dan pengerahan satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
  - c. pelaksanaan mediasi, komunikasi dan fasilitasi anggota satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - d. pelaksanaan pengumpulan dan analisa data daerah rawan bencana serta pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
  - e. pelaksanaan pengerahan anggota satuan perlindungan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana ;
  - f. penyusunan rumusan kebijakan penetapan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat merujuk kebijakan pemerintah ;
  - g. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan peningkatan satuan perlindungan masyarakat ;
  - h. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi daerah ;
  - i. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas ;
  - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya ;
  - k. pelaksanaan koordinasi satuan perlindungan masyarakat dengan Seksi lainnya di lingkungan Satpol PP ;
  - l. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ;
  - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGHITUNGAN/PENJELASAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	Presentase peningkatan kapasitas anggota satlinmas	$\frac{\text{Jumlah anggota Satlinmas yang telah dibimtek}}{\text{Jumlah seluruh anggota Satlinmas}} \times 100$	Data laporan bimbingan teknis/pelatihan anggota Satlinmas
Meningkatnya Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Presentase Peningkatan sumberdaya anggota pemadam kebakaran	$\frac{\text{Jumlah anggota pemadam kebakaran yang telah memenuhi standar/memiliki sertifikat pemadam kebakaran}}{\text{Jumlah seluruh anggota pemadam kebakaran}} \times 100$	Data laporan bimbingan teknis anggota pemadam kebakaran



## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat
2. Tugas :
  - a. menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Bina Potensi Masyarakat ;
  - b. menghimpun, mengolah dan menyajikan data potensi masyarakat dalam mendukung ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
  - c. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan potensi dan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
  - d. menyusun petunjuk teknis pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan potensi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
  - e. melaksanakan analisa pengembangan dan pemanfaatan potensi dan partisipasi masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
  - f. memantau dan mengevaluasi pengembangan potensi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
  - g. menyusun laporan kegiatan pembinaan potensi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
  - h. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang ;
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Pembinaan dan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Kelompok Siskamling yang di bina	Jumlah kelompok siskamling yang dibina merupakan perwakilan dari masing masing Kecamatan se wilayah Kabupaten	- Data kegiatan monitoring dan pembinaan kelompok Siskamling

## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat
2. Tugas :
  - a. menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Perlindungan Masyarakat ;
  - b. menghimpun, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data satuan perlindungan masyarakat, dan data keamanan dan ketertiban masyarakat ;
  - c. menyusun petunjuk teknis pembentukan, pembinaan dan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat ;
  - d. melaksanakan kerjasama pembinaan dan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat dengan instansi dan lembaga terkait dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
  - e. melaksanakan analisa kebutuhan pengembangan dan pelatihan satuan perlindungan masyarakat ;
  - f. melaksanakan kerjasama dengan instansi dan lembaga terkait dalam pembinaan dan pelatihan satuan perlindungan masyarakat ;
  - g. memberikan advokasi dan memfasilitasi satuan perlindungan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta pengembangan kesiagaan dalam pencegahan ancaman dan gangguan ;
  - h. memantau dan mengevaluasi pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat ;
  - i. menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan dalam pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat ;
  - j. menyusun laporan kegiatan pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat ;
  - k. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang ;
  - l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	SUMBER DATA
1	2	3	4
Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah sasaran wilayah pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah wilayah yang dilakukan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan adalah seluruh desa/kelurahan se wilayah Kabupaten	Data kegiatan monitoring/patrol pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
	Jumlah anggota satuan linmas yang dibina	Jumlah anggota Satlinmas yang dilakukan pembinaan/Bimtek Kelinmasan	Data kegiatan pembinaan/Bimtek kelinmasan bagi anggota Satlinmas

## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Kepala Seksi Penanggulangan Pemadam Kebakaran
  
2. Tugas :
  - a. Menyusun rencana dan program kerja seksi Penganggulanhan Bahaya Kebakaran ;
  - b. Melaksanakan Operasional Tugas berkaitan dengan Penganggulanhan Bahaya Kebakaran
  - c. mengatur dan melaksanakan tugas piket untuk kesiagaan Penganggulanhan Bahaya Kebakaran
  - d. melaksanakan penjagaan, pemeliharaan sarana prasarana Penganggulanhan Bahaya Kebakaran
  - e. melaksanakan peningkatan kemampuan sumberdaya manusia di bidang Penanggulangan Bahaya kebakaran
  - f. melaksanakan pengolahan data, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan
  - g. memberikan sarana dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu segera diambil kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	SUMBER DATA
1	2	3	4
Meningkatnya Pencegahan pengendalian Kebakaran dan Bahaya	Jumlah Tenaga Pemadam Kebakaran yang di Fasilitasi	Jumlah seluruh anggota pemadam yang aktif dalam pelaksanaan pemadaman kebakaran	Data laporan kegiatan pemadaman kebakaran dan kegiatan non kebakaran